

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, dimana Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1980, selain itu juga sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang sangat baik seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia pada saat itu. Sampai dengan saat ini sektor pertanian memiliki andil yang sangat tinggi terhadap penghasilan nasional Negara (Rahman, 2018).

Efektivitas dalam sektor pertanian mengacu pada program pemerintah dengan gambaran seberapa kontribusi sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, serta berperan dalam upaya penyedia bahan pangan. Menurut Ramlayana (2020) pangan yaitu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia supaya dapat mempertahankan kehidupan dan kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk untuk suatu wilayah menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah penduduknya sangat besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah didefinisikan efektivitas sebagai ketetapan, hasil guna dan menunjang tujuan. Secara umum, efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, konsep efektivitas sering berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas diartikan sebagai tingkat atau derajat dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Sutrisno, 2011).

Efektivitas program adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan program. Program dikatakan efektif apabila sasaran

dan tujuan program tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Subsidi pupuk dikatakan berhasil apabila masyarakat menerima manfaat dari subsidi pupuk untuk meringankan beban penyediaan dan penggunaan pupuk dalam menjalankan kegiatan usahatani (Arisandi,dkk 2016)

Pupuk bersubsidi adalah pengadaan dan penyaluran dengan mendapat subsidi dari pemerintahan untuk kebutuhan petani atas dasar program pemerintahan sehingga diperoleh adalah harga jual pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani lebih rendah sehingga harga jual hasil usahatani lebih rendah di karenakan biaya produksinya rendah. Tetapi dengan adanya subsidi pupuk tersebut terjadilah kelangkaan pupuk karena jumlah terbatas, diselewengkan dan pengecer pupuk subsidi tidak banyak sehingga terjadilah kekurangan pupuk untuk petani padi sawah sehingga hasil yang didapat oleh petani mengalami penurunan. Dengan berbagai permasalahan pupuk bersubsidi sehingga pentingnya untuk meneliti efektivitas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani.

Kartu Tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR. 310/12/2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin electronic data capture (EDC) di kios pengecer resmi. Kartu tani bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani, terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan asas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Proses pembuatan kartu tani diawali dengan pengajuan ke ketua kelompok tani dengan membawa KTP dan disertakan luas lahan garapan yang dimiliki. Para petani yang sudah memiliki kartu tani tidak sembarang membeli pupuk subsidi ke kios namun untuk pembelian pupuk subsidi ke kios resmi yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Tujuan dari disusunnya pedoman penyaluran pupuk subsidi ini bertujuan supaya para aparat yang bertugas dalam menunjang kelancaran pengadaan pupuk bisa berjalan dengan semestinya.

Kartu tani ini bermanfaat untuk membantu petani untuk dalam mengembangkan usaha taninya. Jika memiliki kartu tersebut, petani mendapatkan berbagai kemudahan yaitu mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang sesuai RDKK yang diajukan kelompok tani. Apabila ada petani yang hendak menebus pupuk, petugas tinggal menggesekkan kartu taninya ke alat yang diserahkan bank kepada kios atau pengecer yang disebut *Electronic Data Capture* (EDC). Nantinya pemerintah memiliki data yang akurat kepada para petani yang mendapatkan alokasi subsidi dan produktivitas lahan pertanian sesuai dengan luas lahan yang digarap petani. Selain itu, ketersediaan data yang lengkap dan akurat dapat dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan dalam pembelian beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta dapat membangun transparansi subsidi pupuk (Among Wibowo, 2020).

B. Rumusan Masalah

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang menyediakan harga yang lebih murah kepada petani akan tetapi kendalanya yaitu mengalami kelangkaan di karenakan jumlah yang terbatas, penyelewengan dan pengecer pupuk subsidi yang tidak banyak.

Kartu tani berdasarkan Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi atau bantuan. Kartu tani dirancang secara khusus untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimulai pada tahun 2018, tiga bank BUMN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian menerbitkan kartu tani tersebut, adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur.

Ardiyanto dan Santoso (2013), menjelaskan kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan karena peningkatan penggunaan pupuk dan terbatasnya pengecer dan penjual di suatu daerah. Tak hanya itu, seringkali juga ditemukan keterbatasan persediaan pupuk, sehingga harga pupuk menjadi meningkat. Harga Eceran Tertinggi dan Harga yang ada di lapangan adalah salah satu masalah yang sering

terjadi dikalangan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BRI menghadirkan kartu tani. Kartu tani berguna untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi masyarakat khususnya petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi, kartu tani berlandaskan pada enam asas yaitu tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat jenis.

Penyaluran pupuk dengan menggunakan kartu tani ini telah di berlakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi.

Pada 2019 kartu tani mulai disalurkan di Kecamatan Payakumbuh dimana salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan memiliki tujuh nagari dengan luas lahan sawah 2057 Ha, telah menyalurkan kartu tani pada tahun 2022 sebanyak 2.028 kartu tani, dari tujuh Nagari tersebut yang mendapatkan kartu tani paling banyak yaitu Nagari Taeh Baruah sebanyak 562 kartu tani yang terbagi ke dalam 18 kelompok tani. Berdasarkan Data Rencana Definitif (RDKK) tahun 2022 kelompok tani yang menerima manfaat dari pupuk bersubsidi melalui kartu tani yaitu petani sawah yang mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK dengan luas lahan petani paling banyak 2 Ha dan paling sedikit 0,5 Ha. Nagari Taeh Baruah sudah mendapatkan kartu tani sebanyak 85% dari total keseluruhan anggota kelompok tani dan 15% petani belum mendapatkan kartu tani. (Penyuluh Pendamping Nagari Taeh Baruah, 2023).

Penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan sebelumnya menggunakan KTP akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam penyaluranya yang tidak tepat pada sasaran. Petani di Nagari Taeh Baruah menyalurkan pupuk subsidi pada tahun 2023 pada masa tanam pertama menggunakan kartu tani sehingga mengalami beberapa kendala yaitu petani yang sudah tua dan tidak terlalu paham tentang menggunakan kartu tani dan adapun kendala yang lain dirasakan petani yaitu pada saat pendistribusian pupuk subsidi dengan kartu tani terkendala jaringan. Dengan demikian perlunya melihat keefektivitasan pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi. (Pengecer Pupuk Subsidi Nagari Taeh Baruah, 2023).

